

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah konflik di Timur Tengah sudah lama menjadi fokus perhatian dunia dan menjadi salah satu isu dalam kajian Hubungan International. Konflik yang berkepanjangan dan latar belakang permasalahan konflik yang bervariasi menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang rentan terjadi konflik. Kepentingan-kepentingan nasional yang saling berbenturan dan adanya campur tangan negara barat di kawasan menjadi salah satu faktor pendorong terus terjadinya konflik di kawasan Timur Tengah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kawasan dan negara mempunyai peluang untuk terjadi konflik dimana hal ini dipengaruhi oleh hubungan antara negara di zaman ini yang menjadi semakin kompleks. Upaya-upaya untuk memenuhi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas negara secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi situasi kawasan dan dunia internasional. Terganggunya stabilitas disatu kawasan akibat kepentingan nasional yang saling berbenturan seperti di Timur Tengah tidak jarang menjadi pemicu terjadinya konflik yang dilakukan oleh negara dengan negara ataupun negara dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Kurdi adalah salah satu etnik yang ada di kawasan Timur Tengah dan keberadaannya tersebar di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang meliputi Irak, Iran, Turki, Israel dan negara-negara luar kawasan Timur Tengah.

Isu separatisme menjadi latar belakang konflik dan kekerasan yang terjadi pada etnik Kurdi di kawasan Timur Tengah dan menjadi latar belakang permasalahan terjadinya konflik antara pemerintah dengan etnik kurdi yang ada di negara-negara kawasan Timur Tengah. Kurdi yang berada di Irak menjadi salah satu kurdi yang dapat dikatakan berbeda jika dibandingkan dengan Kurdi yang berada diluar Irak, dimana hal tersebut didasari dengan adanya perbedaan dalam melakukan pergerakan dengan tujuan untuk menentang pemerintah pusat Irak dan dalam pergerakan yang dilakukan melibatkan jumlah masa yang banyak dalam pelaksanaannya. Kurdi Irak menjadi kelompok yang solid dalam bergerak menentang pemerintah yang didasarkan oleh pandangan yang bertolak belakang dimana karena hal tersebutlah yang ikut memicu dan menyebabkan terjadinya konflik antara etnik Kurdi Irak dan pemerintah Irak yang terus menerus terjadi, hal ini berbeda dan hanya dilakukan oleh etnik Kurdi Irak jika dibandingkan dengan etnik Kurdi yang berada di negara-negara lain.

Permasalahan konflik dan kekerasan yang dialami etnik Kurdi Irak sudah berlangsung sejak tahun 1960, masalah ini diawali oleh tuntutan Kurdi Irak kepada pemerintah Irak agar Kurdi Irak mempunyai wilayah mereka sendiri. Selain itu perbedaan latar belakang budaya dan etnis serta kedekatan hubungan Kurdi Irak dengan Israel menjadi faktor pendorong terjadinya konflik antara Kurdi Irak dengan pemerintah Irak. Ditahun 1966 Menteri Pertahanan Irak Abd al-Aziz al-Uqayli menyatakan bahwa Kurdi Irak sedang berupaya mendirikan Israel kedua di Irak dan mengecam negara barat yang mendukung pemberontakan Kurdi. Beberapa tahun setelah pernyataan tersebut ditahun 1980 Perdana Menteri

Israel Menachem Begin menyatakan bahwa Israel terlibat membantu dalam pemberontakan yang dilakukan Kurdi Irak pada tahun 1965-1975 dengan cara memberi pelatihan militer dan memberikan perlengkapan persenjataan (<https://www.meforum.org/articles/2014/suprising-ties-between-israel-and-the-kurds> diakses 12 maret 2018).

Pecahnya perang Irak-Iran pada tahun 1980 yang diawali oleh masuknya militer Irak ke wilayah Iran untuk mengklaim kembali wilayah yang dikuasai Iran lewat perjanjian dengan pemerintah Irak sebelumnya, memberi peluang kepada separatis Kurdi Irak untuk campur tangan dalam perang tersebut dengan bergabung mendukung Iran memerangi pemerintah Irak. Milisi Kurdi terbagi dalam dua kelompok dalam mendukung Iran yakni *Kurdistan Democratic Party* (KDP) dan *Patriotic Union of Kurdistan* (PUK). Karena adanya bantuan dari kedua kelompok Kurdi dalam memerangi Irak, Iran berhasil meraih pencapaian mereka dan Irak kehilangan kontrol secara *de facto* di wilayah utara Irak yang dimana pada akhirnya wilayah tersebut berada dibawah kontrol kelompok separatis Kurdi. Dalam melihat permasalahan Kurdi Irak yang pelik pemerintah Irak menjalankan gerakan yang dinamai *Al-Anfal Campaign* pada tahun 1986-1989 yang dipimpin oleh Ali Hassan al-Majid sepupu dari Saddam Hussein, operasi ini menargetkan untuk menyingkapkan keberadaan kelompok Kurdi oposisi dengan segala cara yang dapat ditempuh. Selama operasi ini berlangsung, diperkirakan sebanyak 182.000 korban hilang atau terbunuh dan gerakan ini pun merenggut korban yang meliputi perempuan, anak-anak, dan warga sipil Kurdi. Gerakan ini dilakukan dengan menghancurkan markas-markas militer Kurdi dan desa-desa

yang dihuni oleh orang-orang Kurdi dengan menggunakan bom, senapan mesin, dan senjata kimia. Desa-desa yang dihancurkan diperkirakan mencapai 4000 desa dan pada akhirnya gerakan tersebut berhenti karena serangan yang dilakukan Iran kepada Irak semakin menguat dan menyudutkan Irak (Human Rights Watch, 1993 : 5-7).

Pemberontakan Kurdi Irak pada pemerintah pusat berlanjut saat terjadi perang teluk dengan latar belakang untuk mendapatkan kemerdekaan dan membentuk negara Kurdistan di Irak. Pada tahun 1991 Amerika menjadi negara pendorong Kurdi Irak untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah pusat dimana pada akhirnya Amerika meninggalkan Kurdi Irak dan menempatkan Kurdi Irak pada posisi yang tidak menguntungkan dan menjadikan Kurdi Irak sebagai sasaran Saddam Hussein dan menyebabkan banyak etnik Kurdi yang meninggalkan Irak untuk tujuan mengungsi ke negara-negara kawasan seperti Iran dan Turki.

Setelah runtuhnya Saddam Hussein di Irak yang disebabkan masuknya Amerika Serikat dan tentara koalisi untuk mengadili Saddam Hussein yang dituduh melakukan pelanggaran kemanusiaan selama menjadi pemerintah dan dianggap sebagai diktator oleh negara-negara barat, hal ini menjadi peluang besar bagi Kurdi Irak dalam melanjutkan tujuan mereka untuk memiliki wilayah sendiri yang diakui oleh pemerintah pusat Irak secara sah, selain itu pasca masuknya Amerika ke Irak menyebabkan munculnya konstitusi baru Irak pada tahun 2005. Selama rentang waktu 2003-2005 pada akhirnya Kurdi Irak mendapatkan persetujuan untuk memiliki daerah otonom di wilayah Irak Utara dengan bantuan

Amerika dalam melakukan perundingan dan kesepakatan yang dilakukan oleh Kurdi Irak dan pemerintah Irak pada tahun 2005.

Kesepakatan yang dilakukan antara Kurdi Irak dan pemerintah pusat Irak menghasilkan keputusan bahwa Kurdi Irak berhak mengelola wilayah Irak utara dibawah pemerintahan Kurdi Irak dan diberikan keistimewaan dengan menjadikan Irak utara sebagai daerah otonom dibawah pemerintahan Kurdi Irak tanpa ada upaya campur tangan dari pemerintah Irak. Diberikannya daerah otonom kepada Kurdi Irak memicu munculnya agenda referendum pertama yang dilakukan oleh Kurdi Irak dimana referendum pertama yang dilaksanakan pada 30 Januari tahun 2005, bertujuan untuk meminta pendapat kepada masyarakat Kurdi Irak mengenai pembentukan daerah otonom Kurdi Irak. Referendum pertama ini diikuti oleh 1.998.061 warga Kurdi Irak dan referendum ini menghasilkan suara sebanyak 98.98% berbanding 1.02% dimana mayoritas Kurdi Irak memilih setuju dengan adanya rencana untuk membentuk daerah otonom Kurdi Irak di Irak Utara (<https://www.nytimes.com/2005/02/01/opinion/as-iraqis-celebrate-the-kurds-hesitate.html> diakses pada 13 maret 2018).

Setelah diadakan referendum pertama Kurdistan Irak pada 30 januari 2005, Irak kembali mengadakan referendum nasional pada 15 oktober 2005, referendum ini diadakan untuk menentukan sikap Irak dalam melihat konstitusi baru Irak pasca runtuhnya Saddam Hussein, dengan diadakannya referendum tersebut Kurdistan Irak mendapatkan pengakuan secara sah, dimana pada saat diadakan referendum nasional dalam permasalahan konstitusi baru Irak, 78% warga Irak menyetujui tentang adanya konstitusi baru Irak dan karena adanya hal ini

Kurdistan Irak diakui secara institusi wilayah dan mendapat pengakuan terhadap pemerintah regional Kurdistan Irak beserta parlemen regional Kurdistan Irak (<http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=050000&r=306&p=216> diakses pada 13 Maret 2018).

Kurdistan Irak menganut sistem demokrasi parlementer yang terdiri dari 111 kursi parlemen regional, wilayah Kurdistan Irak secara resmi diperintah oleh *Kurdistan Regional Government* (KRG). Pada tahun 2005 Massoud Barzani secara resmi terpilih sebagai presiden dan kembali terpilih pada tahun 2009, pada Agustus 2013 parlemen memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun dan berakhir pada 19 Agustus 2015. Wilayah otoritas Kurdistan Irak sendiri meliputi Dohuk, Erbil, Sulaimaniya dan Halabja, dan Erbil dipilih untuk menjadi ibu kota dari wilayah otonom Kurdistan Irak. Dalam implementasinya pemerintah regional Kurdi Irak diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain sebagai salah satu bentuk kemandirian yang membedakan wilayah Kurdistan Irak dengan wilayah lain yang berada di Irak, pemerintah pusat Irak menetapkan kebijakan tentang kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah regional Kurdistan Irak dengan negara lain, dengan syarat pemerintah regional Kurdistan Irak dapat melakukan kerjasama dengan negara lain selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah Irak. Secara umum pemerintah pusat Irak tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel, dimana dalam konteks ini Irak tetap pada pandangan awal mereka untuk tidak mengakui Israel sebagai negara.

Adanya hubungan kerjasama antara Kurdistan Irak dan Israel yang sudah lama menjadi isu kembali muncul setelah pembentukan wilayah otonom Kurdistan Irak, isu ini kembali muncul saat pemerintah Kurdistan Irak berencana untuk melakukan pembangunan ulang bandara yang berada di Erbil, pemerintah regional Kurdistan Irak berencana akan mengubah pangkalan udara yang berada di Erbil menjadi bandara komersil bertaraf internasional sebagai salah satu infrastruktur penting di wilayah Kurdistan Irak. Rencana ini dilaksanakan oleh pemerintah Kurdistan Irak pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2005 dengan melibatkan banyak perusahaan asing dalam pembangunan bandara Kurdistan Irak di Erbil. Motorola dan Magalcom muncul sebagai dua perusahaan yang menjadi mitra dalam pembangunan bandara Kurdistan Irak, dimana kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha asal Israel yakni Shlomi Michaels (Seyed & Sharham, 2017 : 2).

Hubungan antara pemerintah pusat Irak dan Kurdistan Irak mulai tidak berjalan dengan baik selama periode masa jabatan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki yang meliputi periode tahun 2010 sampai 2014 dimana masalah ini diawali dengan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Irak kepada pemerintah regional Kurdistan sebanyak 17% dari jumlah anggaran Irak. Dalam hal ini pemerintah pusat Irak memperlakukan tentang adanya kontrak-kontrak yang telah ditandatangani secara sepihak oleh pemerintah regional Kurdistan yang melibatkan perusahaan-perusahaan minyak internasional untuk melakukan investasi dan penjualan minyak tanpa melewati regulasi dan persetujuan pemerintah Irak (Al- Qarawee, 2016 : 4).

Selain hal tersebut munculnya permasalahan pembangunan pipa minyak yang dilakukan oleh pemerintah Kurdistan Irak menjadi salah satu masalah yang menjadi pemicu dalam memburuknya hubungan antara pemerintah Kurdistan Irak dan pemerintah pusat Irak. Pemerintah pusat Irak menuduh bahwa pemerintah Kurdistan Irak telah melakukan pembangunan pipa minyak tanpa melalui regulasi yang seharusnya melalui pemerintah pusat terlebih dahulu, dimana pipa ini dibangun untuk menghubungkan antara wilayah Kurdistan Irak dan perbatasan antara Irak-Turki (Cehyan). Selain pembangunan pipa minyak adanya penjualan minyak secara ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Kurdistan Irak menjadi masalah lain yang mendorong hubungan antara pemerintah Kurdistan Irak dengan pemerintah Irak semakin memburuk, pemerintah Irak secara resmi menyatakan akan menuntut perusahaan-perusahaan yang terlibat dan melakukan kerjasama langsung dengan pemerintah Kurdistan Irak, serta menyatakan bahwa yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut adalah sesuatu yang ilegal, dimana dalam hal ini kerjasama tersebut harus melalui pemerintah pusat Irak terlebih dahulu dan tidak dapat dilakukan langsung dengan pemerintah regional Kurdistan Irak (<https://reuters.com/article/amp/idUSL5N0L42VW20140130> diakses pada 13 maret 2018).

Akibat perselisihan antara pemerintah Kurdistan Irak dan pemerintah pusat Irak dalam hal penjualan dan pembangunan pipa minyak di kawasan Kurdistan Irak, masalah tersebut berujung pada pemberian sanksi oleh pemerintah pusat Irak kepada pemerintah Kurdistan Irak, dengan tidak memberikan anggaran belanja daerah kepada pemerintah Kurdistan Irak, akibat dari masalah ini menyebabkan

tidak mempunya pemerintah Kurdistan Irak untuk membayar gaji bagi para pejabat di wilayah Kurdistan Irak. Hal ini menyebabkan munculnya tentang rencana pemasaran minyak secara langsung oleh pemerintah Kurdistan Irak meskipun dalam konteks ini pemerintah Kurdistan Irak mendapat kecaman dari pemerintah pusat Irak.

Masih ditahun 2014, dalam melihat permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah regional Kurdistan Irak, Presiden Kurdistan Irak Massoud Barzani mulai mengeluarkan rencana tentang referendum kemerdekaan yang akan dilaksanakan oleh Kurdistan Irak pada akhir tahun 2014, dan Massoud Barzani dalam hal ini menyatakan bahwa permasalahan tentang referendum kemerdekaan Kurdistan Irak merupakan hak alami bagi Kurdistan Irak dalam memilih dan menentukan kemerdekaan Kurdistan Irak (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15467672> diakses pada 13 Maret 2018).

Dalam rentang waktu 2015, menurut laporan *Financial Times* Israel mendatangkan 77% kebutuhan minyak nasional dari kawasan Kurdistan Irak dan jumlah tersebut diperhitungkan setara dengan 1 milyar dolar jika mengacu kepada harga pasar internasional ditahun 2015. Jumlah pengiriman minyak tersebut diperhitungkan mencapai 240.000 barel minyak perhari dan disalurkan melalui perbatasan Cehyan Turki, isu ini dikonfirmasi oleh juru bicara kepresidenan Kurdistan Irak dan menyatakan mereka tidak peduli tentang siapa yang membeli minyak karena yang mereka butuhkan saat ini hanyalah uang tunai untuk mempersenjatai dan mendanai militer mereka yakni Pasmegrha dalam upaya memerangi kelompok teroris ISIS (<https://www.ft.com/content/150f00cc-472c->

11e5-af2f-4d6e0e5eda22 diakses pada 13 Maret 2018).

Pada 25 September 2017 pemerintah regional Kurdistan Irak melakukan referendum kemerdekaan untuk menentukan sikap mereka dalam rangka melepaskan diri dari pemerintah Irak dan mendirikan negara Kurdistan di Irak. referendum kedua ini diikuti oleh 72% masyarakat kurdi dari 8,4 juta total populasi secara keseluruhan, referendum ini menghasilkan kemenangan telak bagi Kurdistan Irak dimana mayoritas yang berpartisipasi memilih Kurdi Irak untuk merdeka dan lepas dari pemerintah Irak dengan presentase angka 93% berbanding 7% (<https://tirto.id/referendum-kurdi-93-warga-memilih-merdeka-dari-irak-cxqD> diakses pada 13 Maret 2018).

Langkah ini menimbulkan ketegangan dan berpotensi menimbulkan konflik bersenjata baru di kawasan Timur Tengah dimana pemerintah Irak, Turki dan Iran menentang keras referendum yang dilakukan Kurdistan Irak dan pemerintah Irak menyatakan akan mengambil langkah-langkah militeristik jika memang langkah tersebut diperlukan untuk mempertahankan keutuhan Irak. Keputusan pemerintah Kurdistan Irak dalam mengambil langkah untuk memisahkan diri dari Irak disayangkan oleh banyak pihak, dimana referendum yang dilakukan oleh Kurdistan Irak sangat berpotensi menimbulkan konflik baru di Timur Tengah serta dikhawatirkan dapat menghambat dalam proses melawan kelompok teroris ISIS. Pemerintah Kurdistan Irak menyatakan bahwa langkah yang mereka ambil adalah langkah yang memang harus mereka ambil dan tidak akan mengurangi proses dan kinerja mereka dalam memerangi kelompok teroris ISIS (<https://www.dw.com/id/irak-ambil-langkah-konkret-tanggapi-referendum->

kemerdekaan-kurdi/a-40719250 diakses pada 13 Maret 2018).

Ditengah kecaman Irak dan negara-negara kawasan dalam menanggapi referendum kemerdekaan yang dilakukan Kurdistan Irak pada tahun 2017, Israel muncul sebagai negara satu-satunya dan pertama yang mengakui kemerdekaan Kurdistan Irak dan menyatakan dukungannya secara terbuka atas langkah yang telah Kurdistan Irak ambil yang disampaikan secara langsung oleh Menteri kehakiman Israel Ayelet Shaked melalui pernyataannya kepada media masa. Hal ini memicu reaksi dan tanggapan dari negara-negara kawasan yang mengecam referendum kemerdekaan Kurdistan Irak tersebut dimana Turki dan Iran menjadi dua negara yang dengan jelas menuduh bahwa Israel dan Amerika adalah negara-negara yang berada dibalik referendum kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kurdistan Irak pada 2017 (<https://okezone.com/read/2017/09/12/18/1774076/wah-akui-punya-kepentingan-israel-dukung-kurdi-merdeka-dari-irak> diakses pada 13 Maret 2018).

Tuduhan negara-negara yang mengecam referendum Kurdistan Irak bahwa ada peran Israel dibalik referendum tersebut bukan datang tanpa alasan jika dilihat dari latar belakang hubungan kerjasama dan kedekatan antara Israel-Kurdistan Irak. Hal tersebut didasari dengan melihat strategi politik luar negeri Israel yang sempat Israel gunakan selama era pemerintah pertama Israel sebagai salah satu dasar pernyataan adanya peran Israel dibalik referendum kemerdekaan Kurdistan Irak tersebut. *Periphery Doctrine* adalah strategi jangka pendek Israel dengan cara melakukan kerjasama dengan negara-negara non-arab yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan tujuan untuk menguatkan keberadaan Israel di

kawasan Timur Tengah yang dikarenakan pada awal berdirinya negara Israel. Israel menjadi negara yang terisolasi di kawasan hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan kerjasama yang dilakukan antara Israel dan negara-negara arab, baik secara politik maupun hubungan diluar ranah politik dan pada saat strategi ini dilaksanakan oleh Israel, Israel menjadikan Kurdistan Irak sebagai salah satu mitra Israel di kawasan Timur Tengah dalam merealisasikan strategi tersebut ([https://foreignpolicy.com/2010/06/26/the-collapse-of-israels-periphery-doctrine/amp/](https://foreignpolicy.com/2010/06/26/the-collapse-of-israels-periphery-doctrine/) diakses pada 13 Maret 2018).

Selain *Periphery Doctrine* jurnal yang ditulis oleh Oded Yinon dan dipublikasikan pada 1982 yang berjudul *A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties* menjadi salah satu dasar mengapa negara-negara kawasan menyebut adanya keterlibatan Israel dalam referendum Kurdistan Irak pada 2017. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah yang harus diambil Israel untuk menguasai kawasan Timur Tengah dengan cara mendestabilisasi kawasan Timur Tengah dan memecah negara-negara di kawasan tersebut menjadi negara-negara yang lebih kecil sehingga Israel berpeluang menjadi negara superior di kawasan Timur Tengah. Jurnal ini menjelaskan secara eksplisit tentang cara memecah negara-negara kawasan menjadi lebih kecil, dalam jurnal ini disebutkan keberadaan minoritas Kurdistan di utara Irak dan adanya perang sipil dapat menjadi faktor perhitungan dan setidaknya akan membuat Irak terpecah menjadi tiga atau dua negara (Yinon, 1982 : 8).

Terlepas dari dua strategi lama Israel untuk memecah negara-negara kawasan menjadi negara-negara kecil, latar belakang keluarga dari Presiden

Kurdistan Irak Massoud Barzani menjadi salah satu faktor mengapa referendum Kurdistan Irak disebut-disebut sebagai pembentukan Israel kedua di kawasan Timur Tengah. Dimana Mustafa Barzani ayah dari Masoud Barzani disebut-sebut sebagai salah satu mantan pentinggi Mossad dan karena latar belakang keluarga Masoud Barzani ini sangat memungkinkan adanya peran Israel dalam referendum kemerdekaan Kurdistan Irak 2017.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji Dukungan Israel Dalam Referendum Kemerdekaan Kurdistan di Irak 2017 peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti gunakan adalah penelitian dari Yaniv Voller dari *London School of Economic and Political Science (LSE)* yang diajukan untuk mendapat gelar Doctor of Philosophy pada tahun 2012 dengan judul "*From Rebellion To De Facto Statehood: International and Transnational Sources of The Transformation of The Kurdish National Liberation Movement in Iraq Into The Kurdistan Regional Government*". Dalam penelitian ini Yaniv Voller membahas mengenai perjalanan panjang Kurdistan Irak sejak 1958 sampai 2010 dimulai pada saat Kurdistan Irak masih menjadi kelompok pemberontak hingga mendapatkan kewenangan atas daerah otonom mereka di Irak Utara tahun 2005. Setelah runtuhnya Rezim Saddam Hussein di Irak yang diakibatkan oleh masuknya Amerika ke kawasan Irak, menjadi titik balik dimana Kurdistan Irak mendapat kesempatan untuk melanjutkan tujuan mereka dalam rangka mendapat kewenangan dalam mengelola daerah mereka dengan dibantu Amerika sebagai pihak penengah dalam perjanjian dan referendum pertama, hal ini membuktikan

bahwa kuatnya pengaruh dan peranan barat dalam perjalanan Kurdistan Irak dalam memperoleh kewenangan dan mendapatkan legitimasi di wilayah Irak Utara.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizal Makbul dari Universitas Komputer Indonesia Bandung (UNIKOM) pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Strategi Catalonia Dalam Upaya Melepaskan Diri Dari Kerajaan Spanyol 2008-2015*" Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi - strategi yang dilakukan oleh Catalonia dalam upaya melepaskan diri dari negara Spanyol yang dimana strategi ini melibatkan diplomasi dan negosiasi melalui Klub Sepak Bola, Diaspora dan Referendum dalam rangka mewujudkan tujuan Catalonia dalam melepaskan diri dari negara Spanyol, dimana pemerintah Catalonia sendiri sudah berhasil menggelar dua kali Referendum pada tahun 2014 dan 2015 dan diteruskan dengan melakukan negosiasi pada pemerintah pusat untuk memastikan apakah Referendum tersebut sah secara hukum atau tidak.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Winarso Nugroho dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Pesmegrha Sebagai Strategi Utama Irak Kurdistan dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Sejak Munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*" berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Winarso Nugroho lebih menekankan pada peranan Pashmegra sebagai militer Kurdistan Irak dalam memerangi kelompok teroris ISIS sebagai strategi Kurdistan Irak untuk memperbaiki hubungan antara Kurdistan Irak dan pemerintah pusat yang terus berbeda pandangan. Penelitian ini memiliki batasan waktu dari tahun 2003 - 2017

diawali dari saat Rezim Saddam Husein runtuh di Irak dan masuknya Amerika ke Irak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, peneliti berencana untuk meneliti mengenai dukungan dan peran Israel dalam referendum kemerdekaan Kurdistan Irak pada 25 September 2017. Namun dilihat dari tahun 2005-2017 atau setelah terbentuknya daerah otonom Kurdistan Irak. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kepentingan Israel dan apa yang menjadi latar belakang Israel dalam menyatakan dukungan terbuka kepada referendum kemerdekaan Kurdistan Irak tahun 2017 dengan judul skripsi:

“Dukungan Israel Dalam Referendum Kemerdekaan Kurdistan di Irak 2017”

Dalam melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini, peneliti mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah studi Hubungan Internasional, antara lain:

1. Teori Hubungan Internasional, peneliti mempelajari tentang Teori Hubungan Internasional untuk memudahkan dalam membaca perilaku suatu negara ditinjau dari perilaku negara dalam menjalankan politik luar negeri mereka dan kebijakan yang mereka keluarkan dengan menjadikan Teori Hubungan Internasional sebagai tolak ukur.
2. Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika, peneliti mempelajari tentang perkembangan-perkembangan serta konflik yang terjadi di Timur Tengah sehingga memudahkan untuk menganalisa apa saja yang menjadi

faktor pendorong Israel dalam mendukung referendum Kurdistan Irak dan kepentingan apa saja yang Israel kejar dari Kurdistan Irak.

1. Studi Strategis, Peneliti mempelajari tentang Studi Strategis untuk memudahkan dalam menguraikan rencana atau strategi politik baik strategi jangka pendek ataupun strategi jangka panjang yang dipakai dalam menjalankan kepentingan politik.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Apa kepentingan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Kurdistan Irak?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja langkah nyata yang dilakukan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak?
2. Keuntungan apa yang didapatkan Israel dari mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak?
3. Bagaimana pemerintah Irak menyikapi masalah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti menentukan periode penelitian dari tahun 2005-2017 dalam penelitian ini, dikarenakan pada tahun 2005 Kurdistan Irak mendapatkan daerah otonom secara resmi pada 30 Januari 2005 melalui referendum pertama, sedangkan pada tahun 2017 Kurdistan Irak menggelar referendum kemerdekaan dimana referendum kedua ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memerdekakan

diri dari Irak. Oleh karena itu peneliti mengambil periode penelitian tahun 2005-2017 untuk melihat peran apa saja yang Israel lakukan sebagai bentuk dukungan Israel terhadap referendum kemerdekaan Kurdistan Irak dimana dalam hal ini Israel menjadi satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan Kurdistan Irak dan mendukung referendum kemerdekaan yang dilaksanakan Kurdistan Irak pada tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa kepentingan dan peran Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak 2017 sebagai langkah memerdekakan diri dari Irak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja langkah nyata yang dilakukan Israel dalam mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.
2. Untuk mengetahui keuntungan apa yang didapatkan Israel dari mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Irak menyikapi masalah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan baik ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional dalam permasalahan di kawasan Timur Tengah terutama mengenai permasalahan tentang dukungan terbuka Israel dalam referendum Kurdistan di Irak dalam rentang waktu 2005-2017.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat dalam menggambarkan dinamika politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah khususnya antara Israel dan Kurdistan Irak.